

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan politik merupakan sesuatu yang niscaya dalam sebuah negara demokrasi. Warga negara perlu mendapatkan pengetahuan dan pemahaman bahkan pencerahan seputar persoalan politik yang terjadi. Hal ini dilakukan agar warga negara tidak hanya menjadi objek dalam pengambilan keputusan politik melainkan dapat menjadi subjek yang memegang peranan penting dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan. Pada hakekatnya, dalam negara demokrasi kedaulatan berada di tangan rakyat sehingga rakyat harus ikut serta atau berpartisipasi didalamnya. Untuk memunculkan partisipasi politik yang berkualitas diperlukan adanya pendidikan politik.

Ruslan (2000, hlm.87-88) berpendapat bahwa pendidikan politik adalah upaya-upaya yang dicurahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal, yang berusaha membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik orang-orang yang bergerak di lembaga-lembaga tersebut—pada setiap warga negara. Dengan membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik dalam segala tingkatannya, sehingga warga negara menjadi sadar dan mampu memperoleh sendiri kesadarannya. Membentuk dan menumbuhkan kemampuan partisipasi politik yang ia mampu dan senang berpartisipasi politik secara aktif, dalam ikut memecahkan persoalan-persoalan umum masyarakat dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan dan yang mengantarkan kepada perubahan menuju yang lebih baik. Dapat dikatakan bahwa pendidikan politik mengandung unsur-unsur kepribadian politik, kesadaran politik, partisipasi politik, lembaga-lembaga pendidikan, kultur politik dan manusia atau warga negara.

Kartono (2009, hlm.63) menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan bentuk pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan Hariyanti, 2018

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

(Studi Deskriptif Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

politik dan mendapatkan penyelesaian politik agar menang dalam perjuangan politik serta merupakan upaya edukatif yang intensional, terarah dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik.

Pendidikan yang terkait dengan pendidikan politik tidak hanya ditujukan agar warga negara melek politik dengan mengetahui konsep-konsep dan teori politik sebab yang dituju oleh pendidikan politik bukanlah membentuk para ahli ilmu politik tetapi membina warga negara sadar dan peduli terhadap peristiwa politik yang terjadi baik dalam konteks masyarakat maupun negara, diwujudkan dalam bentuk partisipasinya dalam proses politik tersebut (A Kosasih Djahiri, 1979 dalam Sunatra, 2016; Brownhill dan Patricia Smart, 1989; Kartini Kartono, 2009). Oleh karena itu, pendidikan politik penting diberikan kepada warga negara. Terkait dengan beberapa pihak yang memiliki kewajiban yuridis maupun moral dalam melakukan pendidikan politik kepada warga negara, beberapa peraturan perundang-undangan telah mengaturnya. Salah satunya dibebankan kepada partai politik.

Pamungkas (2011, hlm.5) mendefinisikan partai politik adalah sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai dan ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaannya di dalam pemilihan umum. Partai politik merupakan sebuah keniscayaan dalam negara demokrasi karena berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik dan partisipasi politik rakyat, bahkan Rossiter dalam “handbook partai politik” (2015) mengatakan bahwa tidak ada demokrasi tanpa politik, dan tidak ada politik tanpa partai. Menurut Jimly Asshiddiqie (2006, hlm.10) partai politik mempunyai peran penting dalam proses demokrasi.

Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dalam pasal 1 dinyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk Hariyanti, 2018

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

(Studi Deskriptif Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik merupakan salah satu pihak yang dibebani oleh undang-undang untuk melakukan pendidikan politik baik kepada kader partai maupun kepada masyarakat luas. Menurut Hamidi (2010, hlm.16) fungsi pendidikan politik bahkan menjadi fungsi yang diprioritaskan dalam perubahan undang-undang partai politik. Hal ini dibuktikan dengan pengaturan tersendiri fungsi pendidikan politik.

Bentuk pendidikan politik yang dilakukan partai, diatur dalam pasal 34 ayat (3b) UU No.2 tahun 2011 tentang partai politik, bahwa pendidikan politik berkaitan dengan beberapa kegiatan yakni (a) pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan (c) pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Partai politik memiliki tanggung jawab yuridis dan moral untuk mendidik kadernya menjadi warga negara yang memiliki literasi politik yang mantap sehingga mampu melaksanakan fungsi-fungsi partai politik dalam memajukan demokrasi seperti sosialisasi politik, komunikasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan.

Muslimat (2016, hlm.10) berpendapat bahwa kader partai politik adalah sekelompok warga negara yang dididik dalam suatu pendidikan kader dalam organisasi partai politik agar dapat menjadi kekuatan bagi parpol untuk dapat mencapai tujuan parpol tersebut. Rafni dan Aina (2016, hlm.49) menyatakan tujuan pendidikan politik bagi kader dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu *Pertama*, aspek kognitif untuk membangun pengetahuan warga negara (masyarakat sipil) tentang konsep-konsep dasar politik dan pemerintahan. *Kedua*, aspek afektif, untuk membentuk karakter warga negara (masyarakat sipil) yang berpihak kepada demokratisasi dan jati dirinya sebagai pemegang kedaulatan rakyat. *Ketiga*, aspek Hariyanti,2018

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

(Studi Deskriptif Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

psikomotorik untuk membangun kecakapan intelektual dan moral dalam mewujudkan Indonesia yang demokratis. Pemahaman seseorang terhadap politik akan sangat ditentukan oleh proses “belajar” politik yang diterimanya dalam kehidupannya yang akan melahirkan persepsi tersendiri. Persepsi seseorang ditentukan oleh hubungan antara hal-hal yang diyakini dan hal-hal yang diharapkan. Persepsi sangat dipengaruhi oleh faktor pengalaman masa lalu, latar belakang sosial budaya, motivasi dan suasana hati. Persepsi sangat menentukan sikap seseorang. Melalui persepsi yang berfungsi sebagai filter (saringan), seseorang membangun kepercayaan dan motivasi terhadap stimulus politik di dunia nyata.

Pendidikan politik oleh partai memainkan peranan strategis dalam membentuk warga negara terutama kader partai guna memiliki kepribadian politik, kesadaran politik dan mampu berpartisipasi secara aktif dan responsif sebab kader merupakan bagian dari aktor politik praktis yang terlibat dalam sirkulasi kekuasaan publik. Utamanya terhadap kader perempuan, pendidikan politik oleh partai dapat menjadi batu loncatan untuk meningkatkan partisipasi politik kader perempuan baik di tataran internal partai maupun di pemerintahan.

Kader perempuan menempati posisi strategis sebab selain sebagai politisi, ia juga istri dan ibu di rumah, serta anggota dari masyarakat dan perkumpulan lainnya sehingga pengetahuan dan keterampilan yang baik dapat menjadi bekal dalam memberikan edukasi politik bagi lingkungan-lingkungan tersebut dan peka terhadap aspirasi dan kebutuhan mereka. Bentuk pendidikan politik oleh partai akan dipengaruhi oleh visi, misi, dan platform partai sehingga dapat saja menghasilkan model pendidikan politik berbeda yang meliputi strategi, materi dan metode pendidikan politik. Muaranya, proses pendidikan politik di partai berkorelasi dengan tingkat partisipasi politik kader perempuan.

Perbedaan model pendidikan politik oleh partai dimungkinkan mengingat dalam Undang-Undang partai politik tidak ditemukan pola-pola yang baku mengenai pendidikan politik oleh partai serta ketiadaan sanksi bagi partai yang kurang membina

Hariyanti, 2018

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

(Studi Deskriptif Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dan memberdayakan kader. Persoalan ini dapat menjadi celah tersendiri oleh partai untuk mengabaikan pendidikan politik bagi kader perempuan. Oleh karena itu, pola pendidikan politik yang berjenjang dan berkelanjutan tergantung kepada *political will* dan *political action* masing-masing partai. Pengkaderan merupakan bagian dari pendidikan politik yang memegang peranan penting dalam pemberian pengetahuan, pemahaman dan keterampilan politik. Perempuan kader partai membutuhkan sistem pengkaderan yang jelas sehingga dapat membina dan mengarahkan mereka menjadi warga negara, kader partai serta politisi yang mampu memahami hak, menunaikan kewajiban dan melaksanakan tanggung jawab dalam kapasitasnya masing-masing. Untuk menjadi kader yang berkualitas dan terseleksi dalam mengisi jabatan-jabatan publik, perempuan kader partai harus mendapatkan pendidikan politik yang jelas, komprehensif dengan strategi, materi dan metode yang sesuai dengan kebutuhan perempuan itu sendiri.

Undang-Undang Partai Politik memberikan ruang yang terbuka bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif baik di tataran internal partai maupun dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dari tataran internal partai, Undang-Undang mewajibkan keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan partai politik baik di tingkat pusat maupun daerah. Perempuan harus diberikan ruang untuk menjadi pengurus partai dengan menduduki posisi yang strategis dan membuat mereka mampu untuk terlibat dalam posisi pengambil keputusan. Sistem kuota merupakan bentuk *affirmative action* yang harus dipenuhi partai dalam mengajukan calon anggota legislatif dan kepengurusan partai. Kebijakan ini merupakan cara khusus untuk mencapai kesetaraan *gender* dalam berpolitik. Tindakan khusus sementara (*affirmative action*) dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam bidang politik. *Affirmative action* merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pertama kali melalui Undang-Undang No.12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Hariyanti, 2018

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

(Studi Deskriptif Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Susiana dan Cahyaningrum (2010, hlm.27) mengungkapkan bahwa *Affirmative action* yang terdapat dalam Undang-Undang pemilihan umum (pemilu) belum dapat menjamin calon anggota legislatif perempuan untuk terpilih. Aturan tersebut masih perlu dilengkapi dengan aturan-aturan lain yang dapat menjamin agar calon anggota legislatif perempuan terpilih sehingga dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Hasil penelitian tersebut didukung oleh fakta di lapangan bahwa kebijakan *affirmative action* nampaknya belum efektif dalam pencapaian tujuan jika melihat angka keterwakilan perempuan dalam beberapa pemilu setelah regulasi tersebut diberlakukan. Berikut merupakan gambaran keterwakilan perempuan dalam parlemen dari pemilu ke pemilu di Indonesia.

Tabel.1.1 Tabel Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Masa Kerja	Perempuan	Laki-laki
1950-1955 (DPRS)	9 (3.8%)	236 (96.2%)
1955-1960	17 (6.3%)	272 (93.7%)
1956-1959 (Konstituante)	25 (5.1%)	488 (94.9%)
1971- 1977	36 (7.8%)	460 (92.2%)
1977-1982	29 (6.3%)	460 (93.7%)
1982-1987	39 (8.5%)	460 (91.5%)
1987-1992	65 (13%)	500 (87%)
1992-1997	62 (12.5%)	500 (87.5%)
1997-1999	54 (10.8%)	500 (89.2%)
1999-2004	46 (9%)	500 (91%)
2004-2009	61 (11.8%)	489 (88.9%)
2009-2014	101 (18,10%)	459 (82%)
2014-2019	97 (17,3 %)	463 (86,3 %)

Sumber: PUSKAPOL UI (2014)

Dari data diatas terlihat bahwa angka keterwakilan perempuan di parlemen tidak pernah lebih dari 20%. Berdasarkan hasil penelitian Pusat Kajian Politik UI/PUSKAPOL UI, (dirilis pada 26 September 2014) terkait dengan tingkat keterwakilan perempuan di dalam parlemen khususnya di tingkat pusat mengalami penurunan walaupun mengalami kenaikan namun tidak cukup signifikan. Pada Hariyanti, 2018

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

(Studi Deskriptif Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tingkatan DPRD Provinsi juga mengalami penurunan yakni periode 2009-2014 keterwakilan perempuan sebesar 16% dan periode 2014-2019 sebesar 15,85%. Satu-satunya yang mengalami kenaikan yaitu jumlah perempuan di tingkatan DPRD Kab/Kota yang pada pemilu 2009 keterpilihannya hanya 12%, saat ini meningkat menjadi 14%.

Jika mencermati data diatas, terlihat jauh dari harapan kuota 30% keterwakilan perempuan. Menurut Mulia dan Farida,2005, hlm:22) terdapat beberapa alasan partai politik terkait dengan hal ini yaitu: (1) partai kesulitan dalam merekrut calon anggota legislatif perempuan. Tampaknya perlu dicermati terlebih dahulu alasan ini, dapat saja disebabkan oleh system pengkaderan partai yang memang tidak memberi tempat, perhatian dan peluang untuk perempuan; (2) partai politik mengaku sulit mengajak perempuan terlibat dalam wacana politik apalagi mengajaknya terlibat dalam politik praktis.

Sulaiman (2010, hlm.5) berpendapat bahwa partai politik tidak memanfaatkan secara maksimal kebijakan *affirmative action* untuk mendorong partisipasi dan representasi politik perempuan. *Affirmative action* perlu didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan politik yang jelas dan terarah untuk kader perempuan sebab jika pemberian kesempatan untuk aktif dan terlibat dalam politik praktis dibarengi dengan literasi politik dan keterampilan yang baik maka perempuan akan mampu tampil menjadi warga negara, kader, dan politisi yang mampu diandalkan oleh partai dan konstituennya. Artinya, *affirmative action* merupakan pembuka jalan bagi perempuan dalam politik praktis.

Partai politik berperan penting dalam mendorong partisipasi politik dan peningkatan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan internal partai dan lembaga legislatif karena perempuan memiliki pengalaman dan kepentingan yang berbeda dengan laki-laki.Selain itu, partai politik harus mampu meningkatkan kompetensi perempuan untuk ikut dalam kompetisi politik dan meminimalisir kendala yang menghambat partisipasi politik perempuan, salah satunya adalah Hariyanti,2018

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

(Studi Deskriptif Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumater Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

persepsi buruk (stereotip) ditengah masyarakat seputar partisipasi dan keaktifan perempuan dalam politik praktis. Kesalahpahaman inilah yang berujung pada subordinasi perempuan dalam politik. Anggapan tersebut berakar pada masyarakat dengan budaya politik patriarki yang masih kental dan Indonesia masih masuk diantaranya. Budaya politik patriarki menyebabkan perempuan terdiskriminasi dalam berbagai bidang termasuk dunia politik sehingga berujung pada rendahnya angka partisipasi dan representasi politik perempuan (Warjiyati, 2016; Muslimat, 2016). Inilah salah satu alasan kuat munculnya gagasan kebijakan regulasi kuota/*affirmative action* secara global. Berbicara tentang perempuan dan politik, tidak lepas dari *image* dan konstruksi sosial perempuan dalam relasi masyarakat.

Persepsi terhadap perempuan dalam masyarakat yang menganut sistem patriarki cenderung negatif. *Image* yang selama ini diteguhkan dalam benak masyarakat adalah konsep-konsep stereotipe tentang perempuan di berbagai sektor, termasuk dalam sektor politik dan pemerintahan. *Image* yang kebanyakan merupakan stereotipe tentang perempuan, akhirnya “ditarik” ke dunia publik — termasuk di dunia politik— bahwa perempuan “tidak layak” memimpin karena perempuan tidak rasional dan lebih mengandalkan emosinya. Dikotomi publik-*private* inilah yang menghalangi partisipasi dan representasi politik kader perempuan (Astuti, 2008; Wahid, 2013). Selain mengandalkan pada motivasi internal perempuan, juga harus ada dorongan dari sisi eksternal seperti dari partai politik untuk memberikan pembekalan agar kader perempuan aktif, berpikir kritis, dan bertanggung jawab dalam aktivitas politik.

Pendidikan politik yang dilakukan partai tidak hanya ditujukan terhadap perempuan yang duduk di lembaga legislatif tetapi juga kader perempuan biasa maupun perempuan pengurus partai. Hal ini perlu ditekankan karena partai mempunyai fungsi sebagai sarana sosialisasi politik, rekrutmen politik dan komunikasi politik. Kapabilitas kader yang baik pada ketiga bidang tersebut tentu

Hariyanti, 2018

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

(Studi Deskriptif Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dapat membantu partai dalam melaksanakan fungsinya sebab kader merupakan perpanjangan tangan partai.

Politisi perempuan memiliki *concern* yang berbeda dengan politisi laki-laki, mereka cenderung memperhatikan kebutuhan-kebutuhan sosial yang sarat akan pelayanan seperti kesehatan masyarakat dibanding persoalan seputar pertahanan kekuasaan. Pernyataan tersebut didukung oleh sejumlah hasil penelitian di beberapa negara, seperti hasil penelitian Homan (2016, hlm.1) di Amerika Serikat bahwa tingginya angka representasi politik perempuan di parlemen berhubungan dengan kurangnya angka kematian bayi di Amerika Serikat pada periode 1990-2012 dan juga terjadi di daerah Bihar India sebagaimana tergambar dalam hasil penelitian Kumar (2017, hlm.1) disebabkan politisi perempuan *concern* dalam mendorong kemajuan kesehatan masyarakat.

Kemudian, menurut hasil penelitian York (2014, hlm.3). angka kepuasan hidup/kualitas hidup terbilang tinggi pada negara-negara dengan representasi politik perempuan yang juga tinggi karena salah satu indikator yang digunakan adalah pelayanan kesehatan masyarakat mendapat prioritas. Namun, harus juga diakui bahwa kepemimpinan perempuan tidak selalu mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik seperti hasil penelitian Ferreira dan Joseph (2014, hlm.1) di beberapa kota di Amerika Serikat dimana posisi walikota perempuan tidak mempengaruhi ukuran pemerintahan lokal, pengeluaran daerah dan tingkat kejahatan. Meskipun demikian, perempuan yang menang dalam kontestasi politik adalah perempuan yang memiliki keterampilan politik yang superior dibandingkan dengan laki-laki. Jadi, tidak didasarkan pada *charity* tapi keterampilan politik perempuan politisi. Keterampilan politik politisi perempuan diasah dan dipertajam ketika berproses dalam partai politik.

Partai NasDem merupakan salah satu partai politik di Indonesia. Partai NasDem dideklarasikan pada 26 Juli 2011 di Hotel Mercure, Jakarta. Nasdem memulai debut awal dalam kancah politik praktis pada pemilihan umum legislatif 2014 dengan menjadi satu-satunya partai yang lolos untuk mengikuti pemilu 2014 diantara partai-
Hariyanti, 2018

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

(Studi Deskriptif Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

partai baru lainnya. (Tim Divaro dan Yugha E,2014; Afrianti,2015). Dengan mengusung konsep Restorasi Indonesia gerakan perubahan, partai NasDem dalam manifesto politiknya sebagaimana tertulis dalam AD/ART Partai Nasdem dinyatakan bahwa partai “menolak demokrasi yang hanya menghasilkan rutinitas sirkulasi kekuasaan tanpa kehadiran pemimpin yang berkualitas dan layak diteladani serta berdiri untuk membangun politik warga negara berdasarkan cita-cita kesejahteraan dan gotong royong.

Restorasi Indonesia mengandung arti suatu proses untuk mengembalikan, memperbaharui, memecahkan, menata kembali dan memperbaiki kondisi dalam perspektif jangka panjang yang terjadi dari dalam sistem itu sendiri dan dilakukan oleh seluruh komponen bangsa. Restorasi akan memperbaiki, memulihkan dan membangkitkan kembali semangat kebangsaan di dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berpegang teguh pada komitmen nasional yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Semangat restorasi Indonesia gerakan perubahan menjadi slogan, daya tarik sekaligus ciri khas yang membedakan Partai Nasdem dengan partai lainnya.

Di Provinsi Sumatera Barat, anggota legislatif perempuan dari fraksi Partai Nasdem terhitung meraih kursi di daerah pemilihan yang strategis di tengah minimnya representasi politik perempuan. Provinsi Sumatera Barat tercatat menempati 6 posisi terendah dari 33 provinsi dengan angka 9,23% jumlah keterwakilan perempuan (PUSKAPOL UI/ dirilis pada 26 September 2014), sedangkan pada periode sebelumnya 2004-2009 terdapat 5 orang (9%) dan periode 2009-2014 terdapat 7 orang (12%). Pada periode 2014-2019, terdapat 6 kursi anggota perempuan (9,23%) dari 65 anggota di DPRD Sumatera Barat. Di DPRD Sumatera Barat, Partai NasDem memiliki 1 anggota legislatif perempuan atas nama Endarmy SE, saat ini menjabat di Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat (www.DPRD.SUMBAR.com).

Terdapat beberapa hal yang cukup menarik dalam partai NasDem, melalui konsep Restorasi Indonesia gerakan perubahan, Partai Nasdem menginisiasi Hariyanti,2018

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

(Studi Deskriptif Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

beberapa program pendidikan politik guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kader yakni (1) Partai NasDem memiliki program sekolah legislatif dengan rancangan kurikulum yang terstruktur dan sistem pengelolaan terpusat layaknya sistem sebuah sekolah. Sekolah legislatif bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kader yang menjadi anggota legislatif baik di pusat maupun di daerah. Program ini dimulai setelah pelaksanaan PILEG 2014. Di Provinsi Sumatera Barat, dilaksanakan pada 21-23 Agustus 2015, meliputi semua anggota dewan yang duduk di DPRD Provinsi dan kabupaten/kota seSUMBAR. Sekolah legislatif merupakan salah satu bentuk pendidikan politik kepada kader melalui peningkatan kapasitas untuk tugas yang akan diembannya di lembaga legislatif sehingga mampu bersikap aktif, partisipatif dan responsif; (2) konsep tanpa jaminan mahar politik bagi anggota masyarakat yang ingin menjadi kepala daerah maupun anggota lembaga legislatif, menjadi *tagline* Partai Nasdem dalam setiap iklan-iklan politik di media massa.

Pendidikan politik yang diberikan partai berupa pendidikan kewarganegaraan dan kebangsaan sebab partai dalam menerapkan model pendidikan politik (meliputi strategi, materi dan metode) ditujukan tidak hanya mempersiapkan kader menjadi politisi yang loyal terhadap partai tetapi untuk manfaat jangka panjang, yakni membentuk seorang negarawan yang arif dan bijak dalam bersikap dan berperilaku terhadap berbagai persoalan kebangsaan. Pendidikan politik yang dikaji dalam penelitian ini tidak hanya bagi kader perempuan yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat tetapi juga kader perempuan biasa.

Menurut Branson (dalam Sunatra, 2016, hlm.99) pendidikan politik dalam kerangka pendidikan kewarganegaraan bahwa karakteristik warga negara melek politik adalah kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) yang diformulasikan dalam 3 komponen penting yaitu (1) *civic knowledge* yakni pengetahuan dan wawasan kewarganegaraan; (2) *civic disposition* yakni nilai, sikap dan komitmen kewarganegaraan; (3) *civic skill* yaitu perangkat keterampilan intelektual, sosial dan

personal kewarganegaraan yang seyogyanya dikuasai oleh warga negara guna menjadi warga negara yang baik dan cerdas (*to be a good and smart citizen*) sebagaimana yang dicitakan oleh negara.

Upaya peningkatan partisipasi politik kader perempuan melalui Pendidikan politik cenderung berada dalam kerangka keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*). Muchtarom (2012, hlm.4) menyatakan partisipasi merupakan bentuk-bentuk tindakan berupa keaktifan kader perempuan dalam kegiatan kepartaian dan pemerintahan yang didorong oleh kesadaran dan pengetahuan politik yang dimiliki sehingga partisipasi yang dihasilkan bukanlah partisipasi semu. Keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) yang diberikan dalam program pendidikan politik partai meliputi keterampilan intelektual (*intellectual skills*) dan keterampilan berpartisipasi (*participatory skills*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh keterampilan intelektual adalah keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik yang terjadi, dengan melakukan kegiatan diskusi di partai atau menjanging aspirasi masyarakat melalui dialog dan dengar pendapat. Sedangkan contoh keterampilan berpartisipasi adalah keterampilan menggunakan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, pendidikan politik *urgent* diberikan kepada kader partai khususnya kader perempuan mengingat beberapa pertimbangan yakni (1) rendahnya partisipasi politik dan representasi politik kader perempuan di kepengurusan partai serta di lembaga perwakilan rakyat; (2) menghapus stereotip yang terlanjur melekat dalam konstruksi sosial budaya masyarakat mengenai dikotomi perempuan dan politik yang berujung pada pendiskreditan peranan perempuan dalam dunia politik; (3) partisipasi dan representasi politik kader perempuan di kepengurusan partai serta di lembaga perwakilan rakyat dapat menjadi peluang bagi perempuan untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan yang responsif gender. Partisipasi dan representasi politik harus dibarengi dengan literasi politik yang mantap agar usulan kebijakan yang disuarakan menjadi bahan pertimbangan yang patut dipikirkan oleh pengambil kebijakan lainnya, artinya kecerdasan nalar dan keterampilan politik sangat

Hariyanti, 2018

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

(Studi Deskriptif Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

diperlukan oleh seorang kader perempuan partai. Berdasarkan ulasan pernyataan dan data diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “**PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK (Studi Deskriptif pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat)**”.

B. Identifikasi Masalah

1. Pendidikan politik cenderung tidak dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.
2. Ketiadaan program yang jelas dalam pendidikan politik sehingga pelaksanaan pendidikan politik tergantung kepada *political will* dan *political action* partai politik.
3. Ketiadaan model yang jelas mengenai pendidikan politik terhadap kader perempuan partai yang digariskan pemerintah dan partai politik sehingga berpengaruh kepada literasi dan partisipasi politik kader perempuan.
4. *Stereotype gender* masih menjadi persoalan yang menghambat gerak politik perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam tataran politik praktis.
5. Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen pusat maupun daerah.
6. Kecerdasan pemilih dalam menentukan pilihan secara rasional tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas kader perempuan partai

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan partisipasi politik kader perempuan melalui fungsi pendidikan politik?
2. Bagaimana model pendidikan politik Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat yang meliputi strategi, materi dan metode pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi politik kader perempuan?

Hariyanti,2018

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

(Studi Deskriptif Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Bagaimana bentuk kendala-kendala yang dialami Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan partisipasi politik kader perempuan melalui pendidikan politik dan Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam meningkatkan partisipasi politik kader perempuan melalui pendidikan politik?

D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan peranan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan partisipasi politik kader perempuan melalui pendidikan politik
2. Menjelaskan model pendidikan politik Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat yang meliputi strategi, materi dan metode pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi politik kader perempuan
3. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dialami Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat dan mendeskripsikan upaya-upaya yang dapat dilakukan partai untuk mengatasi kendala-kendala dalam meningkatkan partisipasi politik kader perempuan melalui pendidikan politik.\

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Untuk membantu mengembangkan bidang keilmuan yang terkait dengan tema penelitian yakni seputar pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan kajian bidang ilmu politik serta ilmu pendidikan dalam cara penyampaian pendidikan politik kepada warga negara. Terkait dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan yakni membentuk warga negara yang baik dan cerdas maka dapat dikatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian dari pendidikan politik dalam lingkungan pendidikan untuk mewujudkan warga negara yang menyadari kedudukan politik dan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik harus diberikan kepada setiap warga negara tanpa memandang perbedaan *gender* karena politik merupakan urusan setiap orang. Temuan penelitian Hariyanti,2018

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

(Studi Deskriptif Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumater Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengenai pendidikan politik bagi kader perempuan partai dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan program pendidikan politik yang cocok bagi perempuan dan kader perempuan partai ditengah ketiadaan model yang jelas, sistematis, dan berkesinambungan yang digariskan pemerintah dan partai politik.

2. Secara praktis

a. Pemerintah

Memberikan masukan kepada pemerintah untuk merumuskan aturan mengenai kewajiban partai politik dalam membuat program pendidikan politik yang jelas, sistematis dan berkesinambungan kepada kader partai khususnya kader perempuan maupun kepada masyarakat luas. Selama ini pemerintah memberikan garis besar aturan pendidikan politik mengenai model dan program tanpa disertai sanksi atas ketiadaan pelaksanaan program oleh partai. Temuan penelitian ini akan memberikan sumbangan dalam tataran praktis mengenai pendidikan politik khususnya bagi kader perempuan yang rentan kurang terwakili dalam lembaga legislatif dan internal partai politik.

b. Partai politik

Memberikan saran kepada partai politik untuk membuat program yang mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan politik kader perempuan sehingga keterwakilan perempuan menjadi meningkat sehubungan dengan telah adanya aturan hukum yang mengakomodasi bahkan memberikan kebijakan berupa “*affirmative action*” terkait dengan partisipasi perempuan di ranah publik. Temuan penelitian ini akan memberikan dukungan terhadap kebijakan dan aturan hukum yang dikeluarkan pemerintah guna meningkatkan literasi politik dan mendorong partisipasi politik perempuan melalui program pendidikan politik yang jelas, sistematis dan berkesinambungan.

c. Kader perempuan partai

Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada kader perempuan partai seputar pendidikan politik dan meningkatkan kesadaran kader perempuan untuk maju

Hariyanti, 2018

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

(Studi Deskriptif Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dan berpartisipasi di ranah publik melalui partai politik serta menjadi kader yang tanggap dan peka terhadap persoalan sosial politik yang berlangsung. Temuan penelitian ini bertujuan memberikan dorongan dari tataran internal dan mengetuk kesadaran perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik.

d. Masyarakat

Memberikan masukan dan pertimbangan kepada masyarakat dalam memilih pemimpin sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat seputar keaktifan dan partisipasi perempuan di dalam politik praktis karena selama ini masih ada stigma bias gender dan stereotip yang berkembang di masyarakat seputar partisipasi perempuan di ruang publik. Temuan Penelitian ini diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat bahwa politik dan perempuan bukanlah dua hal yang terpisah melainkan adanya keterpautan diantara keduanya.

F. Struktur Organisasi Tesis

Dalam kepenulisan tesis ini, Bab I memuat tentang latar permasalahan--seputar peranan partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik kader perempuan melalui pendidikan politik karena berdasarkan fakta dan data di lapangan terdapat kecenderungan rendahnya partisipasi politik kader perempuan--, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, dan struktur organisasi tesis yang memuat sistematika penulisan tesis. Pada Bab II Kajian Pustaka dijabarkan teori-teori yang digunakan untuk mengupas temuan penelitian. Teori-teori yang digunakan secara garis besar mengenai teori partai politik, pendidikan politik dan konsep gender gender: perempuan dan politik. Lebih lanjut pada Bab III, memuat pendekatan dan metode yang digunakan—penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif--, lokasi dan subjek penelitian—penelitian di lakukan di DPW Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat--, teknik pengumpulan data—menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi--, teknik analisis data—menggunakan model Miles dan Huberman--, dan teknik pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan Hariyanti,2018

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

(Studi Deskriptif Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumater Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

triangulasi teknik pengumpulan data. Pada BAB IV, terdapat pendeskripsian temua penelitian dan pembahasan. Kemudian pada BAB V terdapat kesimpulan, implikasi dan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan pada BAB IV.

Hariyanti,2018

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

(Studi Deskriptif Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumater Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu